



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung;
  6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  9. Kepala Badan Pusat Statistik;
  10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  11. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
  13. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
  14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

15. Kepala ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

15. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
16. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
18. Para Gubernur;
19. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

**PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pelaksanaan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dan hasil Rapat Kerja antara Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 2-3 Februari tahun 2010.

**KEDUA** : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;

6. Infrastruktur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik;
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi;
12. Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan;
13. Prioritas lainnya di bidang perekonomian;
14. Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta kebijakan lain di bidang perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengoordinasikan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan terutama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, serta kebijakan lain di bidang politik, hukum dan keamanan;

3. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, serta kebijakan lain di bidang kesejahteraan rakyat.

KEEMPAT : Para Menteri dan Kepala Lembaga, yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordinasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

KEENAM : Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program yang berada di bawah koordinasinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Presiden, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

KETUJUH : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya



Wakil Sekretaris Kabinet,

Bambang Y. Nahattands



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : I TAHUN 2010  
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2010

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010  
PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYEJELAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Konsolidasi struktur organisasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN	Grand Design reformasi birokrasi nasional dan kebijakan pelaksanaannya	Tersusunnya <i>grand design</i> dan <i>road map</i> reformasi birokrasi	Maret 2010	Tercapainya peningkatan efektivitas dan efisiensi K/L dan BUMN	Kemen PAN dan RB		
	Restrukturisasi BUMN	Pedoman/juknis pelaksanaan Terselaksainnya restrukturisasi PLN dan Pertamina, Inpres tentang <i>Right Sizing</i> BUMN	Desember 2010 Desember 2010		Kemen BUMN		
Penataan otonomi daerah	Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah	Tersusunnya strategi dasar penataan daerah	Desember 2010	Tervujudnya pemantapan otonomi daerah	Kemendagri	Semua daerah	
	Penyempurnaan UU penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah	Ditetapkannya revisi UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu	Desember 2010		Kemendagri		
	Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan per UU-an di tingkat pusat dan daerah	Revisi terbatas UU 32/2004 terkait dengan pelaksanaan Pilkada; ditetapkannya UU tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Jumlah perda yang dikaji dan rekomendasikan tindak lanjut hasil kajian (disetujui, direvisi, dibatalkan)	100%	Desember 2010		Kemendagri	
			kajian 3000 perda	Desember 2010	Daerah terkait	Kemendagri	
	Penetapan hasil harmonisasi dan sinkronisasi peraturan per UU-an di bidang tata ruang	100%	Desember 2010		Kemen PU	Semua daerah	
	Hasil inventarisasi peraturan per-UU an sektor yang belum sejalan dengan peraturan per-UU an otonomi daerah di Pusat dan Daerah	100%	Desember 2010		Kemendagri	Semua daerah	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penetapan dan penerapan Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Jumlah kumulatif SPM yang ditetapkan	Desember 2010	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Kemendagri	
			13 SPM			
Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Pemberian NIK kepada setiap penduduk	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh daerah	Desember 2010		Kemendagri	Semua daerah
			5 SPM			
			329 kab/kota	Tercapainya pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan dalam 3 tahun	Kemendagri	Kab/kota terkait
Pemantapan pengadaan barang dan jasa	Pemberian e-KTP berbasis NIK	Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK	Desember 2010			
			4,2jt jiwa di 6 kab/kota			
			1 RUU	Terwujudnya peningkatan efisiensi belanja negara	L.KPP	
Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Penguatan peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	Terusunnya RUU tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Desember 2010			
			100%		LKPP	Semua K/L dan daerah
Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terbentuknya LPSE baru di K/L/D/I dengan koordinasi LKPP	Desember 2010			
			100 LPSE		LKPP	K/L dan daerah terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

PROGRAM	TINDAKAN	KEJUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi	Peningkatan sistem manajemen BOS	Tersusun dan teraplikasikannya sistem manajemen BOS	Desember 2010	Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau	Kemendiknas	(7)
		Tersusun dan teraplikasikannya sistem manajemen BOS madrasah	Desember 2010			
		Persentase mata pelajaran SD/ sederajat yang dibeli hak ciptanya (total 78 jilid mapel)	Desember 2010			
	Penyediaan buku ajar yang bermutu dan murah melalui pembelian hak cipta	Persentase mata pelajaran SMP/ sederajat yang dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel)	Desember 2010	Kemendiknas	Kemendiknas	Kemendiknas
		Persentase mata pelajaran SMA/ sederajat yang dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel)	Desember 2010			
		Persentase mata pelajaran SMK yang dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel)	Desember 2010			
Perbaikan status gizi anak sekolah	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk siswa TK/RA dan siswa SD/MI terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan	Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS	Desember 2010	Membaiiknya gizi bagi siswa TK/RA dan SD/MI melalui PMTAS	Kemendiknas	Daerah terkait
		Jumlah siswa RA dan MI di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS	1.200.000 siswa 180.000 siswa			





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Penguatan metodologi dan kurikulum	Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Terimplementasinya uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Desember 2010	Terwujudnya kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Kemendiknas	Daerah terkait
Penguatan pengelolaan sekolah	Peningkatan kompetensi kepala dan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	Persentase kepala TK/SD yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase kepala RA/MI yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase kepala MTs yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah/madrasah sebagai satuan pendidikan unggul	Kemendiknas Kemendiknas Kemendiknas Kemendiknas Kemendiknas	Kab/Kota terkait Kab/Kota terkait Kab/Kota terkait Kab/Kota terkait Kab/Kota terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYEJALAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
		Persentase kepala MA yang sudah mengikuti pelatihan kepala madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas TK/SD yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas RA/MI yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas SMP yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas MTs yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas MA yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan pendidikan agama	Peningkatan kualitas guru agama dan relevansi pendidikan di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi agama	Persentase guru agama Islam yang mengikuti pelatihan kompetensi	Desember 2010	Meningkatnya kualitas pendidikan agama	Kemenag	
		Jumlah siswa MA yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri	Desember 2010		Kemenag	
		Jumlah santri yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri			Kemenag	
		Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri			Kemenag	
Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan	Akselerasi penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan	Penyusunan Standar Nasional Pendidikan bagi pendidikan agama dan keagamaan	Desember 2010		Kemenag	
		Satuan pendidikan yang menerapkan sistem penjaminan mutu	Desember 2010	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan	Kemendiknas	
		Jumlah PT masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah PT yang mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship	Desember 2010		Kemendiknas	
		Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Desember 2010		Kemendiknas	
		Persentase satuan pendidikan jenjang SMP menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Desember 2010		Kemendiknas	
Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government di sekolah (e-pendidikan)	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government di sekolah (e-pendidikan)	Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY yang memiliki sistem e-pendidikan	Desember 2010		Kemendiknas	Pemda DIY



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 3 : KESEHATAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan upaya kesehatan preventif terpadu	Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi	Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN))	Desember 2010	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Kemenkes	(7)
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))	Desember 2010			
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	Desember 2010			
		Cakupan kunjungan neonatal pertama (KNI)	Desember 2010			
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi	Desember 2010			
		Cakupan pelayanan kesehatan balita	Desember 2010			
		Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Desember 2010			
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Desember 2010			
		Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	Desember 2010			
		Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum	Desember 2010			
		84				
		84				
		10				
		84				
		84				
		78				
		80				
		8,000			Kemenkes	kab/kota terkait
		85			Kemenkes	
		159 ibukota kec, 18 kawasan khusus perbatasan dan 1,472 desa			Kemen PU	kab/kota terkait